

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil
1.	Nugroho, Hendra, Nurhamdi (2025)	PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN BAGI ANGGOTA KOPERASI PEMBERDAYAAN UMMAT DAARUT TAUHID UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN YANG BERKELANJUTAN	Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif, yang menempatkan anggota koperasi bukan hanya sebagai objek pelatihan, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses belajar.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap perencanaan keuangan, pengelolaan utang, dan pentingnya pencatatan keuangan. Modul edukasi juga disusun sebagai panduan praktis bagi peserta. Kegiatan ini mendorong terbentuknya kelompok belajar keuangan sebagai bentuk keberlanjutan program.
2.	Lupiana, Purwanti (2023)	Peran Koperasi Kredit Indonesia Terhadap Penguatan Literasi Keuangan dan Perbaikan Perilaku Keuangan	Studi eksplorasi ini menggunakan convenience sampling yang diambil dari anggota CU di Indonesia.	Hasil penelitian menemukan adanya hubungan positif antara literasi keuangan dengan perilaku keuangan.

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil
3.	Hanafi dkk (2025)	Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Pandau Jaya	Metode kegiatan PkM diawali dengan pembukaan materi yang bertujuan untuk menginformasikan kepada para pelaku usaha terkait pentingnya memiliki pengelolaan keuangan usaha yang benar kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait solusi yang akan diberikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.	Berdasarkan hasil PkM yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di Desa Pandau Jaya, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan faktor krusial yang memengaruhi tingkat kemandirian finansial pelaku usaha mikro.
4.	Apriadi, Kuswara, (2025)	Meningkatkan Kemandirian Finansial Melalui Penguatan Literasi Keuangan Pelaku UMKM Desa Mekarjaya Kabupaten Bandung	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan berdampak negatif terhadap kemampuan pengelolaan keuangan dan keberlanjutan usaha
5.	Manginda dkk (2025)	Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pada Pelaku UMKMYang Terdaftar Di Inkubator Bisnis Kota	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM yang terdaftar di Inkubator Bisnis Kota Palu memiliki

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil
		Palu Tahun 2023-2024	sampel sensus.	pemahaman yang baik terhadap prinsip dasar pengelolaan keuangan, penggunaan kredit yang bijak, kebiasaan menabung secara rutin, serta identifikasi dan mitigasi risiko keuangan.
6.	Listanti (2025)	Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Fs Umkm Pasar Sumpiuh)	Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif deskriptif.	Berdasarkan hasil analisis terhadap rasio keuangan pada Koperasi FS UMKM Pasar Sumpiuh selama periode 2020 hingga 2024, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Rasio Likuiditas 2. Rasio Solvabilitas 3. Rasio Rentabilitas
7.	Hernawati, Pratama (2025)	Model Pengembangan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Inklusi Keuangan UMKM	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).	Penelitian ini menghasilkan temuan utama yang mencakup tiga aspek utama dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yaitu: (1) peningkatan kapasitas manajerial, (2) pemanfaatan teknologi informasi, dan (3) penerapan prinsip tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance).
8.	Hikmawati, Subroto, Dayu (2025)	Implementasi Pendidikan Literasi Keuangan di Sekolah Dasar	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Literature	Hasil penelitian menunjukkan Pentingnya Pendidikan literasi

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil
			Study and Review, dengan Langkah-langkah menentukan topik yang spesifik, mencari literatur yang relevan, menyeleksi literatur tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan, menganalisis literatur yang telah dipilih, kemudian menginterpretasikan hasil temuan dan yang terakhir menuliskan laporan penelitian.	keuangan ini dapat berdampak di masa depan siswa, karena sangat mempengaruhi pengambilan Keputusan yang baik mengenai keuangan siswa.
9.	Kamil (2025)	Edukasi Pelaporan Keuangan Koperasi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (Sak Ep)	Metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan cara ceramah dan diskusi.	Dari hasil penyampaian materi edukasi pelaporan keuangan koperasi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Desa Situgadung Pagedangan Kabupaten Tangerang, terlihat para peserta menunjukkan antusias yang cukup tinggi saat mengikuti pemaparan materi tentang edukasi pelaporan keuangan koperasi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
10.	Armeyanti, Umyana,	PENGARUH FOMO DAN SOCIAL MEDIA	Metode penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil
	Karpriana (2025)	AINFLUENCERTERHADAPKEPUTUSANINVESTASIDENGANLITERASIKEUANGANSEBAGAIMODERASI	kuantitatif dengan desain asosiatif kausal yang melibatkan 236 responded yang merupakan generasi Z dan milenial di Indonesia.	FOMO dan <i>sosial media influencer</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan infastasi.

Sumber : Data primer diolah 2025

Dari penelitian di atas dan penelitian penulis mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama fokus pada pengelolaan keuangan dan koperasi. Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 1) Berbeda lokasi 2) Berbeda metode 3) Berbeda objek penelitian. Di samping itu masih sedikit penelitian yang mengkaji tentang laporan keuangan koperasi di pondok pesantren. Hal ini unik, karena peneliti fokus pada data nyata yang tidak hanya mengevaluasi ketaatan, tetapi juga mengukur sejauh mana model pengelolaan keuangan koperasi itu efektif dan efisien, serta menganalisis inovasi atau cara terbaik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip ekonomi yang berkelanjutan di pondok pesantren Al-Hidayah Kota Batu.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Literasi Keuangan

Berdasarkan penelitian dari Nugroho, Hendra dan Nurhamdi (2025) literasi adalah kemampuan untuk membaca dan menulis serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam

lingkungan koperasi, pengetahuan tentang keuangan merupakan bagian yang sangat penting bagi para anggota untuk dapat mengatur keuangan pribadi dan usaha dengan baik. Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid, yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, memiliki peranan kunci dalam memperbaiki kesejahteraan anggotanya melalui pemahaman keuangan yang lebih mendalam. Banyak anggota koperasi, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, masih menghadapi berbagai masalah dalam manajemen keuangan, seperti kurangnya ketelitian dalam pencatatan, pemahaman yang minim tentang investasi, serta hambatan dalam memperoleh sumber dana yang sesuai.

Ketidakmampuan dalam mengatur keuangan dapat berpengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan para anggota, bahkan menghalangi perkembangan bisnis mereka. Maka dari itu, program pendidikan literasi keuangan ini disusun untuk memberikan pengetahuan praktis kepada anggota koperasi agar mereka mampu mengatur keuangan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Dewasa ini, masalah literasi keuangan menjadi isu yang menarik perhatian luas dari berbagai kalangan. Literasi keuangan terjadi ketika seseorang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memungkinkannya menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, masih banyak orang yang belum mampu mengelola keuangannya dengan baik dan mengambil keputusan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi karena kurang memahami konsep keuangan.

Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan. Memahami dampak

uang yang timbul dari setiap keputusan keuangan adalah hal penting dalam memahami keuangan. Hasil keputusan berdasarkan informasi yang diakui sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal penting yang harus diingat adalah bahwa literasi finansial hanya membuat seseorang mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat, tetapi tidak menjamin bahwa keputusan yang diambil itu benar-benar tepat. Hal itu terjadi karena seseorang tidak selalu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional. Dalam pandangan Islam, prinsip-prinsip keuangan berpegang pada kaidah syariah yang meliputi larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Di dalam koperasi yang berlandaskan syariah, penting bagi anggota untuk memahami instrumen keuangan yang halal serta strategi pengelolaan keuangan yang sejalan dengan ajaran Islam. (Nugroho, Hendra dan Nurhamdi 2025)

Tujuan peningkatan literasi keuangan untuk anggota Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Di tengah kompleksitas ekonomi yang berkembang, pemahaman tentang pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan perencanaan keuangan yang jangka panjang menjadi sangat krusial. Dengan meningkatkan literasi keuangan, diharapkan anggota koperasi dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijak, menghindari utang yang tidak produktif, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang mereka miliki. (Nugroho, Hendra dan Nurhamdi 2025)

2.2.1. Pentingnya Keberadaan Literasi Keuangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lupiana dan Purwanti (2023) mendeskripsikan permasalahan keuangan dalam kehidupan sehari-hari dapat berdampak pada masyarakat, terutama terkait bagaimana mereka mencapai pandangan yang diperlukan, mengembangkan keterampilan di bidang ini, dan memahami akibatnya terhadap keputusan finansial individu, orang lain, serta lingkungan mereka. Hal ini menciptakan kebutuhan akan konsumen yang memiliki pemahaman finansial bagi pemain di pasar uang dan sektor keuangan. Dipercayai bahwa pengetahuan tentang keuangan dapat membantu mengurangi stres, kesehatan yang buruk, perselisihan finansial, eksploitasi anak, dan konflik antar keluarga. Individu dewasa dalam keluarga yang memiliki pengetahuan keuangan dan kesejahteraan yang lebih baik cenderung mengalami depresi yang lebih sedikit, menunjukkan perilaku yang lebih sedikit agresif dan anti-sosial, serta memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Di sisi lain, dalam konteks pekerjaan dan karir, tingkat literasi keuangan akan berkontribusi pada terciptanya efisiensi dan produktivitas yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membantu karyawan memahami lebih baik keuntungan yang ditawarkan oleh perusahaan dan meningkatkan kebahagiaan mereka di tempat kerja.

Pembahasan mengenai keahlian dalam mengelola keuangan telah menjadi topik yang banyak dibicarakan dalam beberapa dekade terakhir. Pemahaman yang baik tentang literasi keuangan dapat mendukung pelaksanaan fungsi ekonomi. Masyarakat memerlukan pengetahuan keuangan yang akurat untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan

melakukan investasi dengan efektif. Manajemen keuangan sebagaimana yang disampaikan oleh Lupiana dan Purwanti (2023) mendeskripsikan bahwa suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya finansial untuk mencapai tujuan keuangan tertentu.

Dalam konteks koperasi, anggota yang memiliki pemahaman tentang prinsip dasar manajemen keuangan akan lebih efisien dalam mengelola aliran kas, mengawasi pengeluaran, dan mendistribusikan dana untuk investasi yang menguntungkan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang keuangan dapat mengurangi tingkat ketidakhadiran karyawan, menurunkan stres emosional dan kecemasan di tempat kerja, memperkuat manajemen sumber daya manusia, serta meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan profesional karyawan, juga meningkatkan pengetahuan mereka di bidang keuangan. Keuntungan utama dari pendidikan literasi keuangan adalah membantu mengatasi tantangan keuangan karyawan dan mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pribadi, yang akan berkontribusi pada peningkatan efisiensi organisasi. (Lupiana dan Purwanti 2023)

Dalam mengevaluasi tingkat literasi keuangan pada tingkat individu atau kelompok, ada beberapa poin yang sering digunakan sebagai indikator operasional literasi keuangan. Diantaranya adalah:

A. Perencanaan Keuangan (*Financial Planning*)

Personal Finance maupun *Financial Planning* dalam konteks Indonesia sering dikenal sebagai perencanaan keuangan pribadi atau terkadang hanya perencanaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan

keuangan merujuk pada proses perencanaan keuangan bagi individu. Terdapat beberapa definisi perencanaan keuangan dari berbagai sumber. Pada buku ini, kita akan mengambil beberapa definisi dari 4 sumber. Financial Planning Standards Board Indonesia (FPSB Indonesia 2024) mendefinisikan perencanaan keuangan sebagai sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Dalam pengertian tersebut, perencanaan keuangan berfokus pada pencapaian tujuan hidup seseorang melalui aspek keuangan. Oleh sebab itu, tujuan hidup yang dibuat dapat diperhitungkan secara moneter. (Suryandari dan Kristanto 2024)

Dalam pengertian tersebut, perencanaan keuangan adalah bidang studi dan penerapan yang melibatkan berbagai konsep, alat, dan teknik yang digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan kegiatan keuangan pribadi dan rumah tangga. Aktivitas ini mencakup menghasilkan pendapatan, mengelola pengeluaran dan utang, menabung, berinvestasi, dan melindungi sumber pendapatan dan aset. Keseluruhan proses ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan dan menginformasikan praktik dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup individu, keluarga, dan rumah tangga. Perencanaan keuangan pribadi bukan hanya tentang bagaimana mengelola uang secara teknis, tetapi juga bagaimana pengelolaan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. (Suryandari dan Kristanto 2024)

B. Penganggaran (*Budgeting*)

Berdasarkan penelitian dari (Rahmiyati 2021) mendeskripsikan bahwa penganggaran (*budgeting*) dapat diartikan sebagai proses rencana organisasi yang diwujudkan dalam bentuk nilai mata uang (rupiah). Ada dua bagian dalam penganggaran, yaitu:

a. Fungsi Anggaran

Anggaran merupakan suatu alat untuk melakukan perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, anggaran memiliki beberapa fungsi bagi pengguna dan lingkungannya. Dan menurut Rudianto (2009) dalam Mursitawati (2013) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama antara lain sebagai berikut:

- 1) Anggaran sebagai alat perencanaan.
- 2) Anggaran sebagai alat pengorganisasian.
- 3) Anggaran sebagai alat menggerakkan.
- 4) Anggaran sebagai alat pengendalian

Apabila dilihat dari beberapa fungsi yang telah disebutkan di atas, fungsi paling utama dari anggaran ada dua, yakni sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. (Rahmiyati 2021)

b. Siklus Anggaran

Dalam penelitian (Rahmiyati 2021) siklus anggaran merupakan tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran yang bersifat sistematis. Dalam

Mursitawati (2013) diungkapkan beberapa tahapan dalam penganggaran sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan. Tahap persiapan ini dilakukan dengan cara menentukan beberapa anggaran yang diperlukan untuk pengeluaran yang tentunya disesuaikan dengan penaksiran pendapatan yang diperoleh secara akurat.
- 2) Tahap Persetujuan. Tahap persetujuan ini adalah persetujuan dari lembaga legislatif. Anggaran yang telah disetujui oleh kepala pemerintah diajukan ke lembaga legislatif yang selanjutnya lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut.
- 3) Tahap Administrasi. Tahapan ini merupakan tahapan setelah anggaran yang diajukan oleh eksekutif telah disetujui oleh legislatif. Penatalaksanaan anggaran dimulai dari pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan.
- 4) Tahapan Pelaporan. Pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditempatkan dilakukan pelaporan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang berlangsung selama proses pelaksanaan.
- 5) Tahap Pemeriksaan. Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa (*diaudit*) oleh sebuah lembaga pemeriksaan independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik (*feed back*) untuk proses penyusunan pada periode berikutnya.

C. Pencatatan Keuangan (*Financial Recording*)

Pencatatan berarti menulis sesuatu, menyalin, atau memasukkan sesuatu kedalam buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "catat" merupakan dasar dari kata "pencatatan". Pencatatan adalah kegiatan memproses data atau memasukkan data secara baik dan teratur baik dilakukan oleh individu maupun organisasi. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, terdapat beberapa sistem penyusunan catatan yang umum digunakan, yaitu Sistem *Single Entry*, *Double Entry*, dan *Triple Entry*. Pencatatan keuangan adalah proses mendokumentasikan dan merekam transaksi keuangan sebuah entitas atau individu secara sistematis dan terstruktur. (Tumboimbela, Wokas & Kapojos 2025)

Pencatatan keuangan penting untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Pencatatan keuangan mencakup pencatatan setiap transaksi keuangan yang melibatkan penerimaan, pengeluaran, pendapatan, dan utang. Pencatatan keuangan sangat berhubungan erat dengan kemajuan suatu usaha. Dengan adanya pencatatan tersebut, pengusaha dapat memantau sejauh mana perkembangan usahanya. Selain itu, proses pencatatan keuangan yang akurat, tepat, dan jelas dapat memberikan informasi berharga terkait dengan modal usaha. Beberapa masalah umum dalam pengelolaan keuangan yang sering ditemui antara lain, penggabungan keuangan pribadi pemilik dengan keuangan usaha dan kurangnya metode transaksi yang dilakukan. (sunarmi dkk 2024)

D. Pengendalian Pengeluaran (*Expenditure*)

Berdasarkan Penelitian dari menjelaskan bahwa pengendalian secara umum berarti langkah untuk mencocokkan sampai dimana program yang telah digariskan dilaksanakan dan merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan rencana dapat terlaksana dengan baik. Menurut Wasilah, (2009) pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus menerus antara pelaksanaan dengan rencana. Melalui proses membandingkan hasil yang sesungguhnya dengan rencana anggaran, maka manajemen dapat melakukan penilaian atas efisiensi usaha dan kemampuan memperoleh laba dari berbagai produk. Sedangkan menurut Nasehatun (1999) mengatakan bahwa pengendalian biaya berarti serangkaian langkah-langkah mulai dari penyusunan satu rencana biaya sampai kepada tindakan yang perlu dilakukan jika terdapat perbedaan yang sudah ditetapkan (rencana) dengan yang sesungguhnya. Pengendalian biaya dapat dibagi dalam empat langkah, sebagai berikut:

- A. Mencari dasar-dasar dan menetapkan standar untuk biaya;
- B. Membandingkan antara biaya standar dengan biaya yang sesungguhnya;
- C. Mencari dan menentukan bagian organisasi perusahaan maupun di luarnya yang bertanggung jawab atas adanya penyimpangan.
- D. Melakukan tindakan untuk mengurangi atau mengakhiri penyimpangan.

2.2.2 Pengertian Koperasi

Di Indonesia, definisi koperasi secara resmi dan legal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai perkoperasian. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi dapat diartikan sebagai suatu entitas bisnis yang didasarkan pada semangat kekeluargaan dan berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar. Ada lima prinsip utama yang menjadi landasan dalam manajemen koperasi, yaitu keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang demokratis, distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang adil, pembagian imbalan yang terbatas bagi para penyedia modal, serta kemandirian. Pengelolaan keuangan yang sukses melibatkan beberapa elemen penting, yaitu modal (yang berasal dari simpanan anggota dan pinjaman dari luar), pendapatan dan biaya (dari hasil usaha dan pengeluaran operasional), laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, arus kas), serta dana cadangan untuk menjaga kesinambungan operasional. (Muttaqim 2025)

Selain itu, pengertian koperasi juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang penting dan berperan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat secara luas. Perkembangan koperasi bersumber dari tiga lembaga dan jalur. Pertama, koperasi digerakkan oleh organisasi sosial dan politik. Kedua, koperasi berkembang karena digerakkan oleh pemerintah dan ketiga, koperasi berkembang karena digerakkan oleh prakarsa seseorang atau sekelompok orang. Secara bahasa, koperasi secara umum berasal dari kata latin *Cum* yang artinya dengan, dan *Aperari* yang artinya bekerja. Dari kedua kata tersebut, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation* yang dalam bahasa Belanda disebut

Coöperatieve Vereeniging yang artinya bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Papilaya 2025)

2.2.2.1 Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli

A. Menurut Roy (1981), koperasi adalah suatu upaya yang ditujukan untuk mengelola keuangan bersama yang bersifat sukarela, biaya koperasi, kepemilikan modal dan pengawasannya dilakukan oleh anggota sebagai pemakai, penanggung resiko dan keuntungan dibagi secara profesional dengan anggota. Tujuan utama koperasi adalah memperoleh keuntungan bagi pemakai jasa dan pemilik koperasi, anggota koperasi, pemilik koperasi dan pelanggan. (Papilaya 2025)

B. Menurut Ropke (1992), koperasi memiliki asas yang unik yang disebut dengan asas identitas ganda (*Identity Criterion*), yaitu; pemilik dan pemakai unit usaha koperasi merupakan orang yang sama (Papilaya 2025). Berdasarkan asas ganda ini maka koperasi akan diketahui memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Modal yang membiayai perusahaan koperasi adalah milik para anggota dan juga merupakan nasabah utama perusahaan.
- b. Keuntungan perusahaan koperasi dibagikan secara proporsional terhadap kegiatan para anggota dalam perusahaan.
- c. Setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam pengembangan keputusan atau setiap anggota mempunyai hak satu suara dan tidak terikat dengan setoran modal yang telah diserahkan.
- d. Tanggung jawab anggota terhadap koperasi tidak terbatas.

C. Menurut Hatta (1987), koperasi harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jika koperasi sejahtera, maka kehidupan anggotanya juga akan semakin sejahtera. Koperasi Indonesia juga harus berlandaskan kekeluargaan yang mencerminkan hubungan baik antar semua anggota koperasi seperti hubungan antar saudara dalam satu keluarga.

D. Menurut Kirkman, koperasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sukarela atau dioperasikan bersama dengan menggunakan sumber daya fisik, mental, dan material termasuk modal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Papilaya 2025)

E. Menurut ICA (*International Cooperative Alliance*), koperasi adalah sekelompok orang atau badan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi para anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya dengan cara bekerja sama saling membantu dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus berdasarkan asas koperasi. Perkumpulan ini bersifat otonom dengan keanggotaan terbuka dan sukarela untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya melalui usaha bersama saling membantu dan mengendalikan usahanya secara demokrasi. (Papilaya 2025)

F. Menurut ILO (*International Labour Organization*), Koperasi adalah sekumpulan orang yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama melalui pembentukan organisasi yang diawasi secara demokratis. (Papilaya 2025)

2.2.2.1 Tujuan Koperasi

Berdasarkan penelitian dari (Taliupan dkk 2025) mendeskripsikan bahwa tujuan dibentuknya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi anggota-anggotanya melalui kegiatan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip kekeluargaan dan gotong-royong. Berdasarkan UU koperasi No 25 Tahun 1992 pasal 3, tujuan koperasi secara umum adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan tujuan koperasi tersebut, maka bisa dijabarkan beberapa tujuan koperasi yaitu tujuan utama dan tujuan lainnya sebagai berikut:

A. Tujuan Utama

a. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Tujuan yang utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini juga disebutkan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang landasan, asas dan tujuan koperasi. Tujuan didirikan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota-anggotanya dengan menyediakan produk dan jasa yang dibutuhkan. Banyak faedah dan manfaat yang bisa didapatkan dengan menjadi anggota koperasi, mulai dari mendapatkan keuntungan finansial, mampu meningkatkan skill, jujur, mandiri dan kerjasama serta dapat melatih anggotanya agar dapat hidup berorganisasi. Disamping itu Koperasi juga dapat meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan informasi. (Taliupan dkk 2025)

b. Meningkatkan Ekonomi Anggota

Koperasi bertujuan untuk meningkatkan ekonomi anggota-anggotanya dengan menyediakan akses ke sumber daya dan pasar. Dengan menjadi anggota koperasi akan mendapat keuntungan dan pendapatan ekonomi. Selain itu anggota koperasi akan diberi kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dana serta membantu dalam bidang usaha yang dijalani. (Taliupan dkk 2025)

2.2.2.2 Manfaat Koperasi

Berikut ini adalah beberapa manfaat koperasi bagi kehidupan masyarakat, anggota dan pelaku usaha. (Taliupan dkk 2025)

A. Manfaat koperasi bagi anggotanya:

- a) Memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik untuk anggota koperasi minimal harus memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk menikmati fasilitas yang telah disediakan. Contohnya, saat memberi pinjaman, anggota koperasi harus mendapat prioritas utama untuk diberi pinjaman dari pada yang bukan anggota. Atau fasilitas lain, misalnya tingkat bunga yang diberikan kepada anggota harus lebih rendah daripada yang bukan anggota sehingga dapat meminimalisir kemungkinan anggota untuk terhindar dari lintah darat.
- beberapa manfaat koperasi bagi kehidupan masyarakat, anggota dan pelaku usaha. beberapa manfaat koperasi bagi kehidupan masyarakat, anggota dan pelaku usaha. (Taliupan dkk 2025)
- b) Sarana pengembangan potensi dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota setiap anggota koperasi memiliki kemampuan

yang berbeda, seperti dari segi ekonomi atau kemampuan organisasi. Berbagai potensi ini bisa dikembangkan melalui kegiatan berkoperasi. Dengan jasa para anggota, mereka bisa mendapat balas jasa dari koperasi misalnya pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang relatif lebih besar. Jika ada anggota koperasi yang kurang memiliki potensi, mereka juga bisa mendapat manfaat seperti pinjaman atau pelatihan. Intinya kesejahteraan anggota baik yang berpotensi lebih atau tidak berpotensi, tetap dapat ditingkatkan. (Taliupan dkk 2025)

- c) Mudah merencanakan pengeluaran bagi anggotanya sehingga kualitas hidup meningkat Salah satu kemudahan berbelanja di koperasi adalah karena dapat dibayar belakangan. Maka dengan berbelanja di koperasi, anggota bisa merencanakan pengeluaran terlebih dahulu. Setelah mampu memenuhi semua kebutuhannya, tentu akan memengaruhi kualitas hidup anggota. Dengan kualitas hidup meningkat, kesejahteraan juga ikut meningkat. (Taliupan dkk 2025)
- d) Melatih kerjasama berorganisasi dan karakter baik lainnya bagi anggota. Kegiatan koperasi biasanya melibatkan banyak orang. Hal ini tentu bisa melatih anggota untuk bekerja sama, berani bersuara dalam rapat, berkoordinasi, dan lain-lain. Selain itu, prinsip kemandirian koperasi juga membuat anggotanya harus mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain. (Taliupan dkk 2025)

2.2.3 Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama dan dapat terpadu dengan pendidikan umum, yang bertujuan untuk menanamkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia kepada peserta didik yang disebut santri. Keberadaan pesantren di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa dan dinamika pendidikan di Indonesia. Pesantren bukan hanya mencerminkan peran Islam dalam pendidikan nasional namun juga sebagai bagian dari proses perkembangan praktek pendidikan dalam waktu yang panjang. Saat ini posisi pesantren semakin kuat dilihat dari pertumbuhan jumlah pesantren saat ini yang mencapai 26.975 unit hingga April 2022, dari jumlah tersebut pesantren paling banyak berada di Jawa Barat (Data Indonesia, 2022). Dalam mengantisipasi pertumbuhan dan dinamika peranan pesantren dalam pembangunan pendidikan di Indonesia maka penting bagi kita untuk melakukan pendekatan strategik dalam pengembangan praktik pendidikan pesantren. Pada tulisan ini akan disajikan mengenai konsep pesantren konsep manajemen strategik serta strategi pengembangan pesantren. (Shobri dkk 2020)

Dalam memahami pengertian pesantren, perlu dipahami syarat dan pengertian konsep penyelenggaraan pesantren. Hal tersebut penting mengingat dalam konteks praktik pendidikan di Indonesia, pesantren memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari dinamika pembangunan pendidikan. Menurut Martin Van Bruinessen, sejarah pesantren dimulai dari keberadaan makam-makam penting lalu berkembang menjadi sebuah wadah tempat mengajar tasawuf

dan menjadi lembaga dalam bentuk pesantren (Saerozi, 2013), sementara itu pesantren tertua di Indonesia diantaranya adalah Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Kebumen Jawa Tengah (1475), Pondok Pesantren Syekh Jalaluddin di Muara Enim Sumatera Selatan (1423) dan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur (1718) (Siregar, 2021). Dalam sejarah pergerakan perjuangan bangsa pesantren memiliki peran yang penting dalam hal kubu pertahanan yang bersifat mental ataupun moral, dalam arti Pondok Pesantren tidak hanya berperan sebagai sebuah lembaga pertahanan fisik terhadap intimidasi dan senjata penjajah. sunarmi dkk 2024

2.2.3.1 Manajemen Keuangan Pondok Pesantren

Dalam penelitian (sunarmi dkk 2024) mendeskripsikan bahwa penyelenggaraan pesantren-pesantren di Indonesia, mulai dari pendirian, pengelolaan pengembangan dan seluruh kegiatannya dilakukan dengan menggunakan biaya sendiri. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pesantren dikelola secara mandiri. Pengelolaan pesantren ini dilandasi oleh mental al tomad ala nafsi atau percaya pada diri sendiri tidak menunggu bantuan dari luar. Agar dapat dikelola dengan baik maka diperlukan manajemen keuangan yang baik pula.

Di zaman yang sangat cepat berubah, pondok pesantren dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Untuk menjawab tantangan tersebut pondok pesantren membutuhkan terobosan-terobosan baru, antara lain membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman serta menyediakan sarana penunjang proses pembelajaran, seperti laboratorium,

perpustakaan, sarana olahraga, dan lain sebagainya. Pesantren juga perlu memberikan kesempatan bagi santrinya untuk berorganisasi dan mendapatkan pengalaman. Santri juga perlu diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakatnya masing-masing, selama dalam koridor yang diperkenankan dalam Islam. (Sunarmi dkk 2024)

2.2.3.2 Sistem Ekonomi Syariah

Sistem Ekonomi Syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam serta hukum-hukum Syariah. Prinsip-prinsip utama dalam Sistem Ekonomi Syariah mencakup beberapa larangan terhadap *Maghrib*: *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), *haram* (dilarang), *riba* (bunga), serta *bathil* (keburukan), serta ketentuan-ketentuan lain yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan yang utama dari Sistem Ekonomi Syariah adalah untuk menciptakan keadilan sosial, keberpihakan pada masyarakat yang kurang mampu, distribusi kekayaan yang merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Nisa 2024)

Penelitian dari (Nisa 2024) menjelaskan bahwa prospek industri Ekonomi Syariah sangat menjanjikan, baik secara lokal maupun global, dengan pertumbuhan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Beberapa prospek penting untuk industri Ekonomi Syariah meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi Global: Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan prinsip-prinsip keuangan yang berkelanjutan dan adil, terutama setelah krisis keuangan global, minat terhadap Ekonomi Syariah telah meningkat secara signifikan. Hal ini didukung oleh pertumbuhan populasi Muslim

dan minat non-Muslim terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Peningkatan Infrastruktur Keuangan Syariah: Banyak negara telah mengembangkan infrastruktur keuangan syariah, termasuk institusi keuangan syariah, lembaga pengaturan, dan kerangka hukum yang mendukung pengembangan industri Ekonomi Syariah. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan inovasi dalam industri ini.
3. Inovasi Produk dan Layanan: Industri Ekonomi Syariah terus mengalami inovasi dalam produk-produk keuangan dan layanan yang ditawarkan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan adopsi teknologi dalam operasional dan distribusi produk keuangan syariah, seperti platform perbankan digital syariah dan investasi berbasis teknologi blockchain.
4. Diversifikasi Investasi: Ekonomi Syariah tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga mencakup sektor-sektor lain seperti properti, infrastruktur, dan industri halal. Diversifikasi investasi ini memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
5. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah di kalangan masyarakat, termasuk investor dan konsumen, membuka peluang baru bagi pertumbuhan industri ini. Pendidikan dan promosi yang lebih banyak tentang manfaat Ekonomi Syariah dapat membantu meningkatkan

penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam produk-produk dan layanan syariah.

6. Kolaborasi Internasional: Kerja sama antar negara dalam pengembangan Ekonomi Syariah, baik melalui forum regional maupun internasional, dapat memperluas pasar dan meningkatkan aksesibilitas produk dan layanan keuangan syariah. Hal ini menciptakan peluang bagi pertumbuhan global industri Ekonomi Syariah.

Dengan demikian, prospek industri Ekonomi Syariah sangat bagus dengan potensi pertumbuhan yang signifikan di masa depan, terutama dengan adanya dukungan dari faktor-faktor eksternal dan internal yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri ini.

Selanjutnya dalam penelitian (Nisa 2024) dijelaskan juga berkaitan dengan nilai-nilai dasar dalam Sistem Ekonomi Syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum Islam. Beberapa nilai-nilai utama yang menjadi landasan dalam Ekonomi Syariah antara lain (Fuadi, 2022):

1. Keadilan (*Adil*): Prinsip utama dalam Ekonomi Syariah adalah keadilan dalam semua aspek aktivitas ekonomi. Ini mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan, kesempatan ekonomi, dan pembagian hasil usaha. Sistem Ekonomi Syariah menekankan pentingnya menghindari eksploitasi, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi.
2. Keseimbangan (*Mizan*): Keseimbangan merupakan nilai penting dalam Ekonomi Syariah yang mencerminkan kebutuhan untuk mencapai keselarasan atau pemerataan antara kepentingan individu dan masyarakat,

antara kekayaan dan keadilan, serta antara materi dan spiritual. Prinsip ini menciptakan kerangka kerja untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan harmonis.

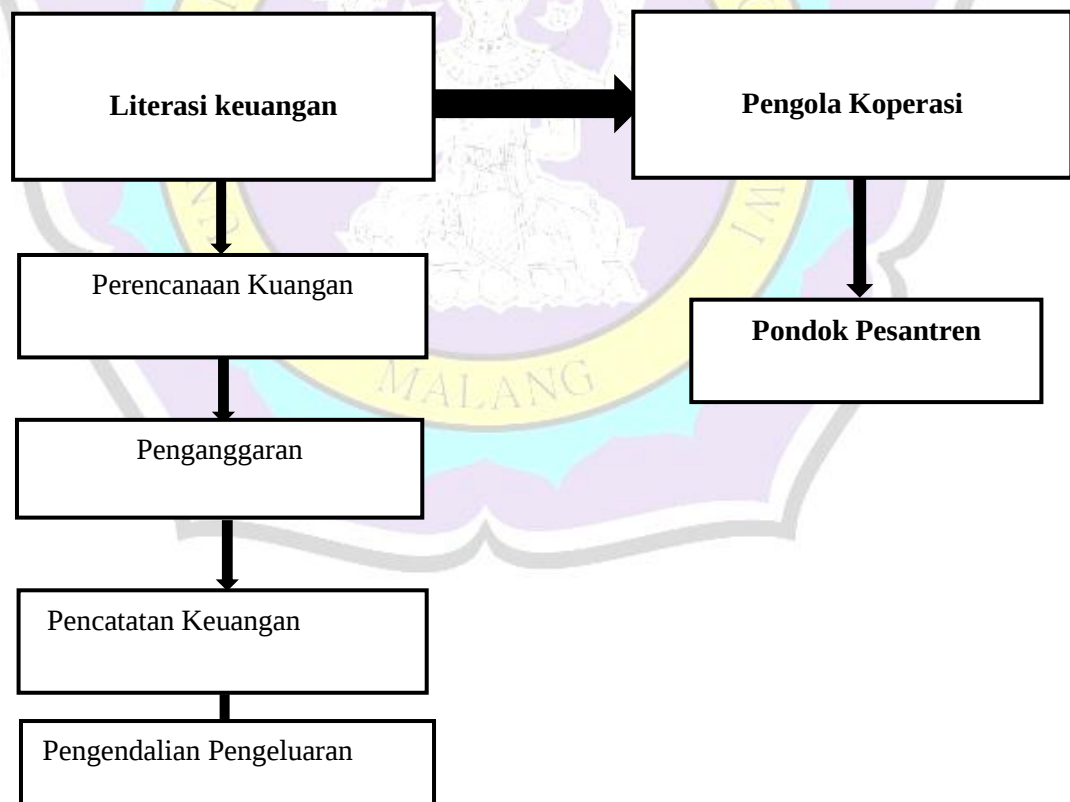
3. Ketentuan Allah (Hukum Allah): Sistem Ekonomi Syariah berdasarkan pada keyakinan bahwa hukum Allah merupakan otoritas tertinggi yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum Allah ialah aspek sentral dalam Ekonomi Syariah, yang mencakup larangan terhadap riba, maysir, gharar, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.
4. Kerja sama dan Kepatuhan (*Ta'awun dan Taqwa*): Kerja sama dan saling tolong-menolong antar individu dan masyarakat adalah nilai yang sangat penting dalam Ekonomi Syariah. Prinsip ini menciptakan landasan bagi kolaborasi yang adil dan saling menguntungkan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, kepemilikan dan penggunaan kekayaan juga harus dilakukan dengan kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah (*taqwa*).
5. Transparansi dan Keterbukaan (*Shuhrah dan Ehsan*): Nilai-nilai transparansi dan keterbukaan dalam semua transaksi ekonomi yang sangat ditekankan dalam Ekonomi Syariah. Prinsip ini menciptakan lingkungan yang jujur dan adil, di mana informasi yang jelas dan jujur menjadi kunci dalam pengambilan keputusan ekonomi.
6. Kemakmuran dan Kesejahteraan (*Falaha dan Barakah*): Tujuan akhir Ekonomi Syariah adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi individu serta masyarakat secara keseluruhan. Namun, kemakmuran

tersebut harus dicapai sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yaitu dengan cara yang adil, berkelanjutan, dan memperoleh berkah dari Allah

Nilai-nilai dasar ini membentuk fondasi moral dan etika yang mengatur aktivitas ekonomi dalam Sistem Ekonomi Syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, diharapkan tercipta sebuah sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermoral sesuai dengan ajaran Islam. (Nisa 2024)

2.3 Kerangka Berpikir

Dalam sub bab ini peneliti akan menguraikan kerangka berpikir secara sistematis yang dimulai dari tujuan penelitian hingga hasil yang diharapkan. Adapun detailnya ada pada gambar 2.1



Sumber : data penelitian 2025

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Dari gambar 2.1. di atas peneliti ingin mengetahui secara mendalam bagaimana koperasi di pondok pesantren Al Hidayah dalam pengelolaan keuangan koperasinya. Indikator keberhasilan pengelolaan koperasi adalah sebagai berikut : 1) Perencanaan Keuangan, 2) Penganggaran, 3) Pencatatan Keuangan, 4) Pengendalian Pengeluaran.

